

JGOP



JOURNAL OF GOVERNMENT AND POLITICS

VOLUME 4, NOMOR 2 DESEMBER 2022

ISSN 2774-728X (PRINT) ISSN: 2686-3391 (ONLINE)



JGOP.FISIP@UMMAT.AC.ID

In Cooperation With



JGOP

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>

Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan
Ekonomi Politik

Faisal Fadilla Noorikhsan, Hendra Gunawan 133-154

Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu
Kota Negara Baru Indonesia

Budiman, E Letizia Dyastari, Rita Kala Linggi, Anwar Alaydrus,
Hendra Saputra 155-174

Eco-Tourism : Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Aceh Jaya

Cut Asmaul Husna, Ikhsan, Yeni Sri Lestari, Vellayati Hajad 175-191

Faksionalisasi Partai Politik Golkar Di Kalimantan Timur
Indonesia

Jauchar B, Budiman, E Letizia Dyastari, Arini Hidayati 192-212

Inovasi Pemerintah Daerah: Aplikasi Siapp Sebagai Dukungan
Smart City Di Kabupaten Kendal

Maulida Putri Rahmawati, Muhammad Fatchuriza 213-230

Perbandingan Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Makassar

Aswar Annas, Humaidid Muhajir 231-251

Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024

Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah 252-269

Resolusi Konflik Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi
Islamic Center Kabupaten Batang

Muhammad Fatchuriza, Maulida Putri Rahmawati 270-284



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 4 No. 2 Desember 2022

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Mengkaji Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik

Faisal Fadilla Noorikhsan¹, Hendra Gunawan²

^{1,2} Universitas Silwangi

InfoArtikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 01-08-2022

Disetujui: 24-10-2022

Dipublikasikan :

18-12-2022

Kata Kunci :

Poverty; Political

Economy; Sustainable

Development

Tulisan ini mengulas tentang kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Pengentasan kemiskinan telah menjadi topik bahasan sejak lama. Jika dilihat dari berbagai faktor, angka kemiskinan telah meningkat lebih dari sepertiga. Sementara, di bidang sosial dan politik telah terjadi transformasi besar seiring semakin berkembangnya demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Tulisan ini berfokus pada pembahasan kemiskinan yang tidak kunjung mereda meski berbagai program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan oleh pemerintah. Pendekatan ekonomi politik dinilai relevan dalam menangani masalah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pertama, ekonomi politik relatif mampu mengatasi kelemahan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, dan budaya. Kedua, pendekatan ekonomi politik adalah kajian yang berusaha menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari perubahan ekonomi dan politik dalam pembangunan di suatu wilayah.

Reviewing the Concept of Poverty Through a Political Economy Approach

Abstract

This paper reviews poverty from a political economy perspective. Poverty alleviation has been a topic of discussion for a long time. When viewed from various factors, the poverty rate has increased by more than a third. Meanwhile, in the social and political fields there has been a major transformation along with the development of democracy and decentralization of government. This paper focuses on the discussion of poverty that has not subsided even though various poverty alleviation programs have been launched by the government. The political economy approach is considered relevant in dealing with poverty reduction policy issues. First, political economy is relatively able to overcome the weaknesses of the economic, social and cultural approaches. Second, the political economy approach is a study that seeks to explain the consequences of economic and political changes in development in a region..

*Alamat Korespondensi:

faisal.fadilla@unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dari program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah di seluruh dunia menetapkan kemiskinan sebagai tantangan utama bagi pembangunan dan merumuskan beragam strategi kebijakan (Kwon & Kim, 2014; Sumner & Tiwari, 2011). Namun, pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah menghambat laju penurunan kemiskinan secara global (Han et al., 2020; Hossain, 2021; Kumar & Pinky, 2021).

Data statistik Bank Dunia dan World Economic Outlook menunjukkan jumlah orang miskin baru akibat pandemi meningkat, dari 88 juta menjadi 115 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem pada 2020. Kemiskinan telah menjadi semakin parah di seluruh dunia dan kesenjangan semakin lebar di beberapa negara (Valensisi, 2020).

Kemiskinan adalah fenomena yang kompleks; tidak hanya terkait masalah ekonomi atau pendapatan (Devereux, 2005; Haggblade et al., 2010), tetapi sering dikaitkan dengan gender (Hilal, 2012), pendidikan (Peadar & Mary, 2012), kesehatan (Wachira & Ruger, 2011; Zou et al., 2019) dan faktor lainnya. Namun, peningkatan produktivitas pertanian, kemajuan teknologi pertanian, pengembangan pariwisata, pendalaman jasa keuangan dan faktor perkembangan industri lainnya telah berperan penting dalam pengurangan kemiskinan beberapa tahun terakhir. Sementara itu, urbanisasi yang meningkat (Chen et al., 2019; Christiaensen et al., 2013), penerapan informasi komunikasi yang luas (Mora-Rivera & García-Mora, 2021) dan bahkan faktor psikologis (Carr et al., 2014; Tamlin et al., 2021) juga memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan.

Pemerintah memainkan peran kunci dalam pengentasan kemiskinan (Donaldson, 2007; Liu & Xu, 2016). Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan umumnya berfokus pada daerah pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pengentasan kemiskinan adalah peluang untuk memperbaiki keterbelakangan pedesaan, sehingga menghilangkan dikotomi desa-kota yang terpisah dan mempromosikan integrasi perkotaan-pedesaan (Ahlers & Schubert, 2013). Sementara itu, konsep pengentasan kemiskinan multidimensi semakin ditegaskan; meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan alasan penting untuk penurunan tingkat

kemiskinan (Li, 2014; Montalvo & Ravallion, 2010), lebih banyak pertimbangan diberikan untuk beberapa dimensi termasuk produksi, kehidupan, kesehatan dan pendidikan dari penduduk miskin (Liu & Xu, 2016).

Tulisan ini mencoba melihat tidak konsistennya ukuran kemiskinan yang digunakan saat ini dari perspektif ekonomi politik. Meskipun data statistik melimpah dan telah adanya kesepakatan global tentang pentingnya pemberantasan kemiskinan, namun masih terdapat ketidakkonsistenan dalam mengukur kemiskinan.

Gagasan ekonomi politik bergantung pada keberadaan biaya dan manfaat politik yang diperoleh dari pengukuran indikator yang kompleks atau sensitif secara politik, dan pada keberadaan hubungan antara politik, polity, dan kebijakan. Interaksi biaya dan manfaat politik ini—berbeda dari perspektif ekonomi, sosial, atau peradilan—dibahas secara ekstensif dalam literatur ekonomi politik (Burgess et al., 2015; Collier, 2011; Mesquita, 2005; Vining & Weimer, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Metode ini digunakan karena secara bibliografi bermanfaat dalam menyatukan informasi empiris untuk membentuk pokok bahasan artikel. Metode studi pustaka juga digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan penulis dalam melakukan kerja lapangan langsung.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian dari kepustakaan. Berbagai data sekunder antara lain: media massa, artikel cetak dan online terkait kemiskinan. Sumber lainnya berupa rekaman video yang menjadi data pendukung penelitian untuk lebih memahami kemiskinan, teori ekonomi politik, dan dampak kemiskinan terhadap sosial politik. Data yang ada diolah oleh penulis sesuai dengan metode critical reading.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat dan Tren Kemiskinan

Meskipun kemajuan besar telah diraih di berbagai bidang sejak tahun 1980-an, kemiskinan tetap ada di negara-negara berkembang, dengan lebih dari 2,1 miliar atau sepertiga dari semua orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi miskin pada tahun 2011, hidup dengan kurang dari \$2,00 per hari.

Sekitar 1 miliar atau satu dari enam orang, sangat miskin, hidup dengan kurang dari \$1,25 per hari. Sebagian besar kemajuan telah dicapai dalam hal pengurangan jumlah orang yang sangat miskin serta timbulnya kemiskinan ekstrem. Sangat sedikit kemajuan yang telah dibuat dalam hal pengurangan jumlah orang yang hidup dengan penghasilan antara 1,25 dan 2 dolar per hari, dengan jumlah mereka meningkat dari tahun 1981 hingga 2005 setelah itu situasi berbalik dan ada penurunan, meskipun kecil, dalam jumlah orang yang hidup dengan penghasilan antara \$1,25 dan \$2 per hari.

Sebagian besar kemajuan dalam turunya angka kemiskinan mencerminkan pengurangan jumlah dan bagian orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem (mereka yang hidup dengan kurang dari 1,25 dolar per hari). Kemiskinan ekstrem telah menurun secara substansial di banyak wilayah, terutama di Asia Timur dan Pasifik serta di Asia Selatan (ini, tentu saja, mencerminkan penurunan besar-besaran dalam tingkat kemiskinan di Cina dan tidak terlalu dramatis, namun, penurunan substansial untuk India.). Di Afrika sub-Sahara, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dan hampir setengah dari populasi (46,9%) tetap ada sangat miskin. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di Asia Selatan, angka kemiskinan di sana masih cukup tinggi, hampir 25%.

Masalah kemiskinan telah menjadi isu utama di berbagai negara. Tidak hanya negara berkembang, negara maju juga menghadapi masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan bukan lagi hanya soal kekurangan pangan, tetapi bagi sebagian masyarakat bahkan sudah sampai pada tahap kelelahan dan kurang gizi yang ekstrim. Banyak orang telah menjadi korban kurang gizi dan kelaparan yang tak tertahankan, yang berujung pada kematian.

Sebagian besar orang menderita karena kemiskinan. Tekanan hidup yang berat menghilangkan semangat, memunculkan perasaan kalah dan tidak berdaya, dan berujung pada kematian, seperti bunuh diri. Bunuh diri dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Kasus bunuh diri menunjukkan kemerosotan manusia. Jatuhnya para korban ke dalam kemiskinan mengungkap persoalan lain, yaitu berkurangnya kepekaan dan kepedulian secara kolektif maupun individu. Para pemimpin kehilangan kepekaan terhadap penderitaan mereka yang berjuang dengan kemiskinan. Sejumlah uang untuk program-program yang ditujukan

untuk memperbaiki banyak orang miskin dicuri oleh skema korupsi yang semakin canggih yang menyebar dari atas sampai bawah. Dampak dari kemiskinan kolektif ini adalah kejahatan luar biasa yang membiarkan beberapa anggota masyarakat bergulat dengan kerasnya hidup. Masalah kemiskinan menjadi lebih akut ketika terjadi di negara yang dikategorikan sebagai negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Kekayaan sumberdaya alam seolah menjadi kutukan karena masih ditemukan kelompok masyarakat yang hanya makan sekali dalam sehari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat kemiskinan sebagai persoalan utama setiap negara-bangsa. Pencarian solusi atas kemiskinan dilakukan hampir semua negara dengan serangkaian uji coba kebijakan. Tujuannya jelas, kebijakan diarahkan dan diharapkan dapat menanggulangi masalah dan mengurangi angka kemiskinan serta mengangkat derajat orang miskin. Di Indonesia, misalnya, sejumlah program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, infrastruktur, dan kapasitas telah dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), PUAP, PPIP, dan berbagai program lainnya yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Namun, program-program pengentasan kemiskinan nampaknya belum cukup menjadi solusi. Kemiskinan adalah fenomena multidimensi. Ia adalah fenomena politik, sosial, ekonomi, serta budaya yang kompleks dan memiliki sifat unik dan spesifik. Kemiskinan menjadi unik dan spesifik karena, pertama, penyebab kemiskinan antara satu wilayah dan wilayah lainnya tidak sama. Kedua, kelompok miskin dalam suatu wilayah memiliki karakter dan respon yang berbeda terhadap situasi miskin yang dihadapi. Ketiga, kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi, politik dan kultural, tidak semata-mata fenomena kewilayahan (Nurhasim et al., 2014).

Selain itu, dalam tataran praktis, sasaran program pengentasan kemiskinan adalah wilayah secara luas. Hal ini menyebabkan program yang disebarkan kepada warga tidak tepat sasaran, bukan kepada orang miskin, karena program tidak khusus bagi kaum miskin, tetapi warga secara luas. Akibatnya program pengentasan kemiskinan kurang menjawab persoalan kaum miskin. Seharusnya program disusun atas dasar penyebab kemiskinan yang dihadapi komunitas warga miskin. Pemberdayaan, infrastruktur dan program berbasis kapasitas juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman hak-hak politik, dengan asumsi bahwa jika masyarakat miskin

terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan dan pemantauan program, mereka secara tidak langsung dapat mengatasi kemiskinan yang mereka hadapi. Namun dalam praktiknya, mereka didiskualifikasi pada saat penentuan program karena program tersebut mengharuskan kompetisi.

Program pengentasan kemiskinan yang terlalu di dominasi pembelajaran hak-hak politik warga pun menyebabkan minimnya pemberdayaan bagi kaum miskin dalam beberapa kasus bahkan kaum miskin kesulitan mengakses dana program pemberdayaan (permodalan atau simpan pinjam) karena ada kekhawatiran tidak dapat mengembalikan dana.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan pengentasan kemiskinan adalah pendekatan ekonomi politik. Pentingnya pemahaman pendekatan ekonomi politik bahwa pendekatan ekonomi politik dinilai mampu mengatasi kelemahan pendekatan dari segi ekonomi, pendekatan sosial dan kultural, serta pendekatan kemanusiaan semata. Pendekatan ekonomi politik menjadi alat penjelas bagi masalah-masalah kemiskinan secara lebih komprehensif. Pendekatan ekonomi politik juga diharapkan tidak hanya mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dalam ilmu ekonomi tetapi juga kelemahan-kelemahan dalam ilmu politik. Menurut Rachbini, pendekatan ekonomi umumnya hanya menelisik aspek kelembagaan pasar tanpa menyentuh kelembagaan non-pasar. Sementara politik biasanya kekurangan kerangka analisisnya untuk melihat fenomena ekonomi atas dasar institusi pasar. (Rachbini, 1994)

Dalam mengkaji masalah kemiskinan melalui pendekatan ekonomi politik ini, bidang politik menjadi subordinat bidang ekonomi. Sistem politik digunakan sebagai latar untuk menganalisis fenomena ekonomi dimana peristiwa ekonomi terjadi. Ekonomi dilihat sebagai suatu tindakan, sementara politik adalah ruang bagi tindakan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi politik bertujuan untuk menjelaskan berbagai tindakan ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dalam aktivitas politiknya. Pemikiran pendekatan ekonomi politik, misalnya, muncul dalam bentuk analisis tentang rent-seeking di negara berkembang.

Asumsi utama dari pendekatan ekonomi politik adalah setiap individu atau kelompok kepentingan berusaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Semua sumberdaya ekonomi dan politik yang mereka miliki digunakan untuk mencapai

tujuan. Salah satu sumber ekonomi politik yang umum digunakan adalah lobi. Sebuah kebijakan muncul sebagai hasil dari lobi. Persoalannya, kebijakan yang dibuat melalui proses lobi akan berdampak besar ketika diterapkan. Proses lobi dapat memakan waktu karena membuat keputusan yang diambil melewati mekanisme politik dan ekonomi pada akhirnya tidak dapat merespon dengan cepat perubahan dan teknologi baru (Oktavianti, 2008).

Kemiskinan di Pedesaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan ekstrem lebih sering terjadi di pedesaan daripada di perkotaan. Bank Dunia memperkirakan bahwa, pada tahun 2010, 78% dari masyarakat yang sangat miskin tinggal di daerah pedesaan (World Bank, 2015d).

Orang pedesaan di sebagian besar negara berkembang, tetapi terutama di sub Sahara Afrika, mengandalkan pertanian untuk bagian penting dari pendapatan mereka (World Bank, 2007). Rumah tangga pedesaan merupakan contoh untuk rumah tangga pertanian. Meskipun pertanian lebih umum di antara rumah tangga pedesaan daripada perkotaan, rumah tangga perkotaan terlibat dalam budaya pertanian dan keterlibatan itu tidak dapat diabaikan. Zezza dan Tasciotti (2010) menunjukkan bahwa bagian rumah tangga perkotaan yang terlibat dalam pertanian (produksi tanaman dan/atau pemeliharaan ternak) bervariasi dari minimal 10% sampai maksimum 70%.

Perbincangan tentang ekonomi politik pedesaan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan publik. Negara mempengaruhi desa secara legal formal yang berimplikasi pada perubahan besar terkait dengan independensi desa dalam mengatur perekonomiannya sendiri (Jati, 2016). Desa adalah entitas yang dapat dikatakan merdeka dan bebas dari pengaturan negara. Berbagai studi antropologis yang mengkaji desa melihat proses ekonomi politik yang terjadi di pedesaan sebagai kapitalisme periferi. Karena corak ekstraktif dari moda dan alat produksi dalam aktivitas ekonominya. Nilai yang dihasilkan dari produksi subsisten tersebut bersifat mikro material. Upaya improvisasi faktor produksi masih sangat minim.

Dalam pengaturan sumber daya ekonomi di tingkat desa dikenal istilah *common pool resources*. Istilah ini berarti bentuk pengelolaan bersama yang dilakukan oleh setiap anggota komunitas masyarakat. Mekanisme pengelolaannya, yaitu setiap anggota masyarakat sendiri memiliki cara untuk memastikan bahwa sumber daya alam sendiri terbagi secara merata (Hardin, 1968)

Masyarakat menunjukkan peran aktif dengan memastikan ketersediaan sumber daya ekonomi berjalan seimbang. Pada dasarnya, *common pool resources* adalah bagian dari rezim pengaturan sumber daya ekonomi seperti *state way* maupun *market way*. Adapun *state way* lebih mengedepankan adanya pengaturan negara dalam pengaturan redistribusi tersebut (Jati, 2016). Pengaturan oleh negara bisa lebih fleksibel dan simultan. Ini menjadi karakteristik sebuah negara untuk melakukan monopoli tunggal atas pelayanan publik.

Dalam praktik pengentasan kemiskinan pendekatan politik dan pilihan kebijakan berpengaruh terhadap hasil pengentasan kemiskinan. Suatu negara atau wilayah menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbeda berdasarkan situasi aktual (Ayala et al., 2011). Untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan, setiap negara, di bawah kendali institusi-institusi politiknya, mengadopsi kebijakan yang tepat, seperti prioritas yang diberikan kepada sektor pedesaan (Gaspart, 2013), transfer pendapatan (Notten, 2016), upah minimum, reformasi administrasi, dan kebijakan preferensi kelompok khusus. Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan berbeda-beda. Misalnya, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui bauran kebijakan yang efektif, sedangkan pengurangan kemiskinan di Pakistan kurang efektif karena ketimpangan distribusi pendapatan (Stewart, 2013)

Perlindungan sosial adalah salah satu tanggapan langsung pemerintah terhadap kemiskinan. Program perlindungan sosial, jika dirancang dengan tepat dan tepat sasaran, membantu mengisi kekurangan pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin rumah tangga. Ketika diberikan pada interval yang teratur dan dapat diprediksi, mereka juga memiliki dampak produktif dengan menyediakan beberapa tingkat jaminan di mana rumah tangga dapat mengambil keuntungan dari peluang ekonomi. Selanjutnya, manfaat sosial perlindungan mungkin memiliki dampak berlipat ganda pada masyarakat lokal dan ekonomi (FAO, 2015).

Memaknai Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan telah berkembang dalam hal konsep, definisi dan interpretasi. Kemiskinan pertama mengacu pada konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, yang kemudian berkembang menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan secara luas dipahami sebagai kekurangan uang dan barang. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai fenomena multidimensi dan secara paradoks,

bahkan dalam konteks Indonesia, kemiskinan menghadirkan keunikan tersendiri. Lebih tragis lagi, kemiskinan di Indonesia mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan terletak pada masalah ekonomi dan sosial. Sebagai masalah ekonomi, kemiskinan disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu kurangnya pendapatan dan jumlah kalori per individu. Sedangkan sebagai masalah sosial, kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam pembangunan karena kurangnya pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga menyulitkan individu untuk mencapai tingkat kebahagiaan yang sama.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan dan diukur dari empat perspektif. Pertama, sudut pandang moneter. Dalam perspektif moneter kemiskinan dipandang sebagai kurangnya individu untuk mencapai tingkat konsumsi minimum. Pandangan ini mengukur kesejahteraan konsumsi total individu. Dalam kacamata moneter seseorang masuk kategori miskin apabila pengeluaran atau pendapatannya di bawah rata-rata. Pendekatan ini telah diterima secara luas karena mudah diterapkan dan mudah ditemukan solusinya.

Kedua, pendekatan kemampuan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pembangunan dilihat sebagai perluasan kemampuan manusia, bukan hanya sebagai pemaksimalan utilitas dari penggunaan tersebut, yaitu pendapatan. Pendekatan ini dikontraskan dengan pendekatan moneter karena lebih menitikberatkan pada indikator kebebasan (freedom) untuk menghidupi diri sendiri daripada nilai-nilai kehidupan. Kemiskinan dari perspektif kapasitas didefinisikan sebagai kurangnya kapasitas atau ketidakmampuan individu untuk mencapai kompetensi dasar. Kapasitas dasar yang dimaksud tidak lain adalah kemampuan untuk melakukan secara maksimal fungsi-fungsi vital individu guna mencapai standar hidup minimal yang memadai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah harapan hidup, kesehatan, interaksi emosional, emosional dan sosial serta perlindungan dan diskriminasi.

Pandangan ketiga adalah pendekatan eksklusi sosial. Perspektif ini umumnya diterima di negara-negara industri untuk mewakili proses marginalisasi dan perampasan hak atas pemenuhan ekonomi dasar. Meskipun hal ini sangat tidak mungkin, karena banyak negara maju memberikan perlindungan sosial yang komprehensif. Misalnya, komunitas Uni Eropa. Dalam masyarakat Uni Eropa,

pengucilan sosial didefinisikan sebagai kondisi yang membuat individu atau kelompok dikeluarkan sepenuhnya atau sebagian dari partisipasi penuh dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Pada tingkat aplikasi, definisi ini dapat dilihat dari langkah-langkah seperti tingkat pengangguran, akses ke perumahan, pendapatan minimum dan eksposur sosial, dan pembatasan kewarganegaraan dengan hak-hak demokratis. Di negara berkembang, pendekatan ini umum di India, Venezuela, Tanzania, Tunisia, Kamerun dan Thailand (Yustika, 2009).

Keempat, pendekatan partisipatif. Selama ini definisi kemiskinan ditentukan oleh pihak luar tanpa melihat kemiskinan dari sudut pandang orang miskin itu sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk membayangkan kembali dan mengubah praktik-praktik ini dengan melibatkan masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin dan tingkat kemiskinan. Konsep penilaian kemiskinan partisipatif (PPA/Participatory Poverty Assessment) diadopsi dari konsep Participatory Rural Assessment (PRA). Sebenarnya, pendekatan ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu asosiasi dengan penentuan nasib sendiri dan pemberdayaan, asosiasi yang meningkatkan efektivitas program, dan penekanan pada pembelajaran satu sama lain. Pendekatan ini cukup kompleks untuk diterapkan karena melibatkan banyak aspek yang berbeda, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan politik lokal.

Pendekatan kemiskinan di atas mempertahankan tiga pandangan yang ada tentang penyebab kemiskinan, yaitu pendekatan struktural yang lebih dekat dengan pandangan eksklusi sosial, di mana kebijakan pemerintah tidak mendukung bantuan kepada orang miskin. Bentuk kemiskinan yang paling umum adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan ini bukan bersifat individual melainkan kemiskinan kelompok masyarakat karena berbagai penyebab kondisi masyarakat yang kompleks dan kompleks. Keadaan ini berlangsung lama. Dalam jangka pendek, tidak cukup hanya berurusan dengan program pembangunan. Hal ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan tentang kondisi dan karakteristik masyarakat miskin.

Pandangan sumber daya lebih dekat dengan pendekatan moneter yang lebih luas. Kemiskinan dianggap karena tidak tersedianya sumber daya ekonomi dan alam. Sementara itu, situasi kemiskinan kultural disebabkan oleh sikap hidup sebagian masyarakat miskin yang tidak memiliki kemauan untuk berubah. Pada akhirnya,

perbedaan pandangan ini mengarah pada dua situasi, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut berada di bawah garis kemiskinan jika digunakan pendekatan moneter. Kemiskinan absolut biasanya diukur dengan standar yang nyata. Orientasi pengukurannya pada kebutuhan hidup dasar minimal masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan. Namun, karena ukurannya dibuat lebih dulu membuat ukuran yang digunakan satu negara dengan negara lain berbeda. Pengukuran kemiskinan absolut mengundang beragam kritik sebab satu ukuran dibuat untuk semua konteks masyarakat, padahal kebutuhan sandang, pangan, dan papan berbeda-beda. Selain itu adanya pemikiran yang memasukan pendidikan, rekreasi, dan keamanan sebagai bagian kebutuhan dasar hidup.

Sedangkan kemiskinan relatif identik dengan ketimpangan pendapatan. Biasanya, program pengentasan kemiskinan berfokus pada peningkatan mereka yang berada dalam kemiskinan absolut. Sementara itu kemiskinan relatif didasarkan pada the idea of relative standard. Kemiskinan relatif memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya kemiskinan di suatu wilayah dan masa tertentu tidak sama dengan kemiskinan di wilayah dan masa yang lain. Ukurannya berorientasi pada derajat kelayakan hidup. Kritik terhadap kemiskinan relatif ini adalah sulitnya menentukan potret hidup layak, apa yang dianggap layak oleh masyarakat tertentu belum tentu oleh masyarakat lain. Namun, konsep kemiskinan relatif dinilai lebih tepat karena mempermudah pengambil kebijakan merumuskan strategi efektif untuk merumuskan jalan keluarnya. (Sunyoto, 2006)

Dimensi Sosial Dan Politik Kemiskinan

Dimensi sosial politik dari kemiskinan berfokus pada derajat akses terhadap kekuasaan, termasuk tatanan sistem sosial politik, yang dapat menentukan alokasi sumber daya yang berpihak pada kelompok orang atau tatanan sistem sosial. Politik melihat kemiskinan sebagai gejala yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan kreativitas manusia dan sosial, dan pada gilirannya kualitas manusia.

Kebijakan pemerintah dalam kerangka sosial-politik mungkin disengaja atau tidak disengaja, beberapa di antaranya mengarah pada kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pandangan para ahli teori politik bahwa kebijakan pemerintah yang buruk adalah penyebabnya, bukan masyarakat miskin dan negara menjadi miskin (*poor making countries poor*). Banyak kebijakan ekonomi pemerintah yang berkontribusi

dalam mempersulit upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama kebijakan yang menetapkan harga pokok rendah dan subsidi impor beras dan bahan pangan lainnya, telah menurunkan semangat petani untuk menanam padi, merupakan kebijakan ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian atau tidak mempertimbangkan hubungan antara pertumbuhan pertanian dan industri. Di lain pihak, di beberapa negara berkembang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan digunakan sebagai alat tawaran pemenang dalam pemilihan umum (pemilu), namun isu-isu tersebut tidak selalu menjadi agenda setelah kemenangan.

Tidak mudah untuk menentukan jumlah orang miskin dengan tepat. Secara umum, jika seseorang atau sekelompok orang tidak menyadari hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, satu kalimat dengan makna yang sangat luas dapat menangani seluruh pembahasan. Misalnya, apa artinya menjalani kehidupan yang layak? Apa saja hak-hak dasar itu? Selain itu, tidak semua hak-hak dasar dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik terancam atau terancam oleh kekerasan. Dari pengertian di atas kemiskinan adalah masalah multidimensi yang sulit diukur, sehingga pendekatan pengukuran yang digunakan perlu disatukan. Salah satu konsep yang digunakan untuk menghitung kemiskinan yang sering digunakan adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konsep ini, penyempitan berarti kemiskinan hanya dapat dilihat sebagai kondisi ekonomi yang tidak dapat menutupi kebutuhan dasar dan non-pangan (Suhariyanto, 2011).

Saat ini ekonomi politik untuk kemaslahatan rakyat sedang diuji dengan sangat serius. Ketika pertumbuhan ekonomi dianggap berhasil, namun kesejahteraan rakyat di bawahnya dipertanyakan. Terdapat kontradiksi pada wacana kinerja dan kebijakan untuk menjadi "unggul" dalam kinerja ekonomi oleh pemerintah di satu sisi dan masalah kemiskinan serta sektor informal yang masih buruk belum terselesaikan di sisi lain. Situasi ini dikaitkan dengan kemiskinan yang meluas dan tidak dapat diukur dengan standar kemiskinan tunggal.

Tiga Ciri Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia memiliki tiga ciri utama. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di atas garis kemiskinan nasional. Artinya, itu adalah persyaratan minimum bagi orang Indonesia di tingkat nasional. Pada dasarnya kebutuhan

minimum ini didasarkan pada kebutuhan kalori yang berjumlah 320 kg beras per tahun di perdesaan dan 80 kg beras per tahun di perkotaan. Ini setara dengan kebutuhan kalori sebesar 1.821 kalori per tahun atau setara dengan 0,99. kg beras per hari (Sumardi Mulyanto dan Evers, 1999)

Kedua, pendapatan menjadi ukuran kemiskinan mengaburkan garis kemiskinan. Beberapa orang mungkin tidak tergolong kaum miskin dalam pendapatan, tetapi karena kurangnya akses pada layanan dasar dan indikator pembangunan manusia yang rendah. Ketiga, wilayah Indonesia secara geografis sangat luas dan beragam. Keluasan dan keragaman ini menyebabkan perbedaan karakteristik yang mendasari kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya, garis kemiskinan yang ditarik selalu merupakan garis kemiskinan yang rendah. Itu berarti ratusan orang harus membeli listrik, menikmati air bersih, nutrisi yang lebih baik, perumahan yang layak, dan hidup dalam isolasi sosial dan geografis. Mereka masih tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka dan kekurangan perawatan medis yang memadai. Semua pengeluaran untuk kebutuhan dasar sekarang tampak buruk. Tidak hanya harga komoditas yang terus naik, tetapi juga biaya lain seperti transportasi, listrik, dan biaya kuliah. Situasi ini telah lama dipersalahkan sebagai penyebab meningkatnya angka putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga untuk mendukung pendidikan pasca sekolah menengah bagi anak-anaknya membuat banyak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, apalagi perguruan tinggi. Tak heran jika banyak anak-anak yang duduk diam di jalan tanpa ada gerakan apapun. Situasi ini mempengaruhi rumah. Insiden kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat.

Ketika kita berbicara tentang masalah kemiskinan, satu-satunya solusi adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan akses politik. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, lebih banyak pekerjaan akan tercipta. Orang mendapatkan penghasilan ketika mereka memiliki pekerjaan. Dengan tingkat pendapatan tersebut, mereka memiliki daya beli dan dapat meningkatkan kualitas keluarganya. Perekonomian dapat berubah lebih cepat karena orang memiliki daya beli yang lebih besar.

Para pakar kebijakan dan politik menunjukkan bahwa salah satu masalah mendasar adalah arah pembangunan ekonomi yang sangat tidak menguntungkan bagi ekonomi mikro. Situasi ini menyebabkan konsentrasi industrialisasi yang moderat dan akibatnya sektor-sektor ekonomi yang dijalankan oleh sebagian besar kabupaten atau kota tidak diperhitungkan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berusaha mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke tingkat sebelum Covid-19, tetapi masih di dominasi oleh orang-orang sangat kaya yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi rumah tangga. Sektor industri, di sisi lain, berfokus pada penciptaan nilai untuk menyerap pekerjaan. Industrialisasi bisa menjadi satu indikator suksesnya pertumbuhan ekonomi tetapi justru melemah.

Dari perspektif ekonomi politik, ketimpangan pembangunan antar sektor ekonomi disebabkan oleh kegagalan strategi pembangunan. Dukungan politik bagi pembangunan sektor industri tanpa partisipasi sektor pertanian secara historis telah menciptakan banyak relung bagi masyarakat miskin. (Yustika, 2009). Sayangnya, meskipun ada persyaratan khusus seperti dalam pemberian subsidi, sistem perdagangan, lisensi dan monopoli, pembangunan industri skala besar yang digalakkan oleh pemerintah gagal. Di sisi lain, kebijakan ini telah meningkatkan konsentrasi sektor industri dengan struktur pasar yang berkembang dengan baik. Tingkat ketimpangan yang tinggi berdampak besar tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada keadaan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa "kesenjangan adalah kerentanan kritis". Ini juga berlaku untuk orang Indonesia. Inti dari kesenjangan tersebut adalah tidak setaranya dalam akses ke sumber daya ekonomi. Masalah ketimpangan adalah masalah keadilan yang terkait dengan masalah sosial (Oman, 2005). Masalah ketimpangan erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.

Sosiolog Mochtar Naim, melaporkan bahwa sejauh ini hanya "apa, bagaimana, dan dengan hasil apa secara makro, dibagi dengan total populasi" yang ditekankan. Dia melaporkan bahwa dia tidak pernah mengatakan, "Oleh siapa, untuk siapa, menurut stratifikasi sosial." Di sisi lain, masyarakat Indonesia sangat kompleks dan berlapis bahkan cenderung dualistik dan dikotomis. Sayangnya, seperti di masa kolonial, stratifikasi dan dualisme atau dikotomi sosial ini cenderung etnosentris dan

bias etnis, sekelompok orang menguasai sebagian besar kekayaan negara. Kelompok masyarakat hukum adat terbesar yang menjadi ahli waris yang sah dari republik ini menerima bagian dan bagian terkecil.

Pengaruh Politik dan Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan

Dalam perekonomian Indonesia, penyebab utama kemiskinan adalah buruknya praktik pembangunan akibat buruknya perumusan kebijakan ekonomi (sosial dan politik) di sektor pertanian. Selanjutnya, sektor-sektor ekonomi kecil yang didominasi partisipasi masyarakat, seperti sektor informal, seringkali tersingkir untuk digantikan oleh kegiatan ekonomi yang lebih modern, seperti pabrik, manufaktur, pusat perbelanjaan, dan pusat komersial dan industri.

Namun, sejak Maret 2015 hingga September 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin turun dari 28,59 juta menjadi 2,79 juta. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 25,95 juta pada Maret 2018, turun dari 280.000 pada September 2018, turun menjadi 530.000 pada Maret 2019, dan 350.000 pada September 2019. Daerah perkotaan kehilangan 13.100, 530.000 dan 137.000, sedangkan daerah pedesaan masing-masing kehilangan 262.100 (27.000) dan 880.000. Jumlah penduduk miskin perkotaan mulai meningkat pada Maret 2019, sedangkan jumlah penduduk miskin pedesaan menurun antara Maret 2019 hingga September 2019. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perkotaan terus meningkat dari 7,07 poin persentase pada Maret 2018 menjadi 6,56 poin persentase pada September 2019. Prevalensi pedesaan menurun 13,20 poin persentase menjadi 12,6 poin persentase pada Maret 2018. Angka pengentasan kemiskinan di pedesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan, namun angka menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan masih lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin perkotaan. Antara September 2019 dan Maret 2020, jumlah dan prevalensi kemiskinan perkotaan, pedesaan, dan nasional meningkat. Jumlah penduduk miskin meningkat masing-masing sebesar 1.300.000, 333.000 dan 1.630.000 poin atau 0,82 poin persentase, 0,22 poin persentase, dan 0,56 poin persentase. Jumlah rumah tangga miskin pada Maret 2020 sebanyak 26,2 juta, meningkat 1,63 juta (9,78%). Dari perspektif regional, tingkat peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi daripada di pedesaan. Kesenjangan antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan tetap besar.

Daerah-daerah di Indonesia menunjukkan derajat dan derajat kemiskinan yang berbeda-beda, dengan tingkat kemiskinan dan keparahan yang berbeda-beda. Informasi ini penting dalam merencanakan tindakan mitigasi. Jika ada kebijakan alokasi anggaran sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan, perlu diperhatikan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan, indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan. Proses umum tidak efektif dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya dan harus dihindari dalam desain dan implementasi program.

Data profil kemiskinan yang konsisten menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin Indonesia tinggal di pedesaan. Berdasarkan pulau, Jawa memiliki jumlah terbesar. Menurut data BPS 2018, setiap negara bagian memiliki lebih dari 3 juta orang miskin. Namun demikian, angka kemiskinan tertinggi (penduduk miskin dengan jumlah penduduk lebih besar dari 20 ribu) terdapat di Indonesia bagian timur, yaitu provinsi NTT, Papua dan Papua Barat (Bappenas 2018). Penyebab utamanya adalah ketidakberdayaan karena keterisolasian geografis dan kurangnya akses telekomunikasi, teknologi, dan faktor yang dominan adalah masyarakat yang hidup dari pertanian tetapi tidak memiliki produk-produk kelas atas (Bappenas 2018, 2020). Tingginya tingkat bencana alam dan perubahan iklim juga berperan, karena sering merusak lahan pertanian, perumahan dan fasilitas umum.

Pandemi Covid-19 yang melanda perekonomian global telah menghentikan tren penurunan kemiskinan. Ketika Covid-19 muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar serta melanda China secara lokal pada akhir Januari 2020, baru menyebar secara global dari Februari hingga akhir Mei, dan badan penasihat lainnya juga telah membuat keputusan strategis lainnya. Dunia (pemerintah, swasta, akademisi, Bank Dunia dan IMF) memperhitungkan hal ini, sehingga prospek ekonomi setelah 2020 diperkirakan menggunakan asumsi biasa (Muhyiddin, 2020)

Pemerintah Indonesia kemudian akan mengatur Pembatasan Sosial Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh daerah, negara bagian, atau kabupaten/kota, tergantung dari berat ringannya wabah tersebut. Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. evaluasi. Aturan pelaksanaan PSBB diatur dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu, aturan PSBB tertuang dalam Peraturan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. PP dan

Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Kebijakan PSBB mempengaruhi pertumbuhan penduduk miskin.

Kebijakan PSBB jelas bukan untuk rakyat miskin. Meski pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi terhadap masyarakat miskin, namun secara umum kebijakan tersebut masih memiliki kelemahan. Kelemahan pertama adalah pengentasan kemiskinan (biasanya) diterapkan secara konsisten tanpa mengaitkan dengan konteks sosial, ekonomi dan budaya (kota) masing-masing daerah. Akibatnya, kebijakan di satu lokasi (masyarakat) seringkali tidak konsisten, meskipun program berhasil di lokasi lain (masyarakat).

Kedua, penggunaan parameter pihak eksternal (dipaksa dari luar) dan terlalu ekonomis (moneter). Artinya, konsep pengentasan kemiskinan bergerak ke arah yang salah dan sifat dasar kemiskinan semakin berkurang. Ketiga, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan terlalu birokratis dan banyak yang gagal karena prosedur yang rumit. Keempat, pengentasan kemiskinan seringkali bermotif politik sehingga tidak masuk akal untuk meningkatkan status sosial ekonomi orang miskin. Kelima, karena kebijakan anti-kemiskinan tidak melihat aspek institusi ekonomi sebagai prinsip untuk diadopsi, beberapa kebijakan tersebut gagal karena aturan utamanya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan.

Selain itu, pandangan lain berpendapat bahwa pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program pengentasan kemiskinan biasanya berfokus pada upaya untuk mendistribusikan manfaat sosial kepada masyarakat miskin, seperti beras untuk masyarakat miskin dan Program Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin (JPS). Upaya tersebut akan sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan saat ini. Karena sifat dukungan tidak memberdayakan dan bahkan dapat menyebabkan kecanduan.

Program bantuan yang berfokus pada kedermawanan pemerintah sebenarnya dapat memperburuk moral dan perilaku orang miskin. Program untuk membantu orang miskin harus lebih fokus pada pengembangan budaya efisiensi ekonomi dan kemampuan untuk membebaskan orang dari kecanduan kronis. Di sisi lain, program bansos ini juga dapat menimbulkan korupsi distribusi. Hibah teratas akan dikirim langsung ke perbaikan

PENUTUP

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang khusus, perlu penanganan terpadu, persisten dan dipraktekkan secara konsisten. Mayoritas negara berkembang selalu memperhatikan aspek kebijakan sosial sebagai andalan program mereka. Ini bisa menjadi rencana pengurangan kemiskinan. Secara umum program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di Indonesia di masa pandemi Covid-19, masih berorientasi pada peningkatan ekonomi yang berupa pertumbuhan dan belum berorientasi pada penguatan masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh sebab itu persoalan produktivitas bagi kelompok masyarakat miskin secara agregat masih belum mendapat perhatian layak. Kenyataan tersebut ditambah dengan munculnya ketidakadilan di dalam proses implementasi yang ternyata lebih menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan ketimbang kaum miskin kondisi ini terjadi begitu lama sehingga memunculkan kondisi dependensi baik secara ekonomi maupun politik.

Secara alamiah setiap orang mendambakan kehidupan yang layak dan bebas dari kemiskinan. Namun, situasi seperti itu hanya memenuhi kepuasan hidup pribadi. Padahal, manusia adalah makhluk sosial, yang berarti setiap orang adalah bagian dari masyarakat. Sebagai makhluk sosial (Dumairy, 1997), manusia harus "hidup bersama" masyarakat lainnya. Kesetaraan kemakmuran dalam arti nuansa adalah cara agar masyarakat dapat hidup sehat dan damai dalam masyarakat tanpa menimbulkan kebencian sosial. Kesetaraan sama pentingnya dengan kemakmuran. Menurunkan angka ketimpangan sama pentingnya dengan mengurangi kemiskinan.

Berbagai pengukuran statistik telah menunjukkan masih adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kebahagiaan meningkat untuk beberapa variabel, tetapi perbedaannya sangat mencolok. Angka melek huruf penduduk di atas usia 10 tahun di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Bayi perkotaan dan anak balita berprestasi lebih baik di sekolah daripada teman sebayanya di pedesaan. Bangunan rumah penduduk kota jauh lebih baik daripada rumah penduduk pedesaan. Indikator kualitas hidup juga lebih baik di kota ketimbang di desa. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran tentang kesenjangan kehidupan sosial antara masyarakat pedesaan dan

perkotaan. Ketimpangan sosial tidak hanya terjadi antar individu dan kelompok melainkan juga antar daerah. Kita membutuhkan pengurangan kemiskinan. Sampai batas tertentu, kemiskinan dikaitkan dengan ketidaksetaraan. Tetapi mengurangi kemiskinan tidak berarti mengurangi ketimpangan. Sebagai bangsa, kita tidak hanya ingin hidup sejahtera (bukan kemiskinan), tetapi kita juga menginginkan kesatuan dalam kemakmuran, kemakmuran yang setara tanpa perbedaan yang mencolok satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ahlers, A. L., & Schubert, G. (2013). Strategic modelling: "Building a new socialist countryside" in three Chinese counties. *The China Quarterly*. <https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/strategic-modelling-building-a-new-socialist-countryside-in-three-chinese-counties/0653598EA881EAD7F0C2BCEE64C730A4>

Ayala, L., Jurado, A., & Pérez-Mayo, J. (2011). Income poverty and multidimensional deprivation: Lessons from cross-regional analysis. *Review of income and ...* <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2010.00393.x>

Burgess, R., Jedwab, R., Miguel, E., Morjaria, A., & ... (2015). The value of democracy: evidence from road building in Kenya. *American Economic ...* <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20131031>

Carr, S. C., Thompson, M., Dalal, A. K., & ... (2014). Psychology and poverty reduction: A global special issue. *International ...* <https://psycnet.apa.org/record/2014-34414-001>

Chen, M., Sui, Y., Liu, W., Liu, H., & Huang, Y. (2019). Urbanization patterns and poverty reduction: A new perspective to explore the countries along the Belt and Road. *In Habitat International*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019739751830852X>

Christiaensen, L., Weerdt, J. De, & Todo, Y. (2013). Urbanization and poverty reduction: the role of rural diversification and secondary towns¹. *Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.1111/agec.12028>

Collier, P. (2011). *Conflict, political accountability and aid*. api.taylorfrancis.com.

<https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203842256&type=googlepdf>

Devereux, S. (2005). Can minimum wages contribute to poverty reduction in poor countries? *Journal of International Development*.
<https://doi.org/10.1002/jid.1183>

Donaldson, J. A. (2007). The state, the market, economic growth, and poverty in China. *Politics & Policy*. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2007.00088.x>

Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.

Gaspart, F. (2013). *Agricultural Policies for Poverty Reduction*. academic.oup.com. <https://academic.oup.com/erae/article-abstract/40/1/215/425717>

Haggblade, S., Hazell, P., & Reardon, T. (2010). The rural non-farm economy: Prospects for growth and poverty reduction. *World development*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X10000963>

Han, J., Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2020). Income and Poverty in the COVID-19 Pandemic. *nber.org*. <https://www.nber.org/papers/w27729>

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons: the population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality. *science*.
<https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>

Hilal, R. (2012). Vocational education and training for women and youth in Palestine: Poverty reduction and gender equality under occupation. *International Journal of Educational Development*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059312000272>

Hossain, M. I. (2021). COVID-19 impacts on employment and livelihood of marginal people in Bangladesh: lessons learned and way forward. *South Asian Survey*. <https://doi.org/10.1177/0971523121995072>

Jati, W. R. (2016). Globalisasi dan kemiskinan desa: analisa struktur ekonomi politik pedesaan. In *Jurnal penelitian politik*. download.garuda.kemdikbud.go.id.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505093&val=10355&title=globalisasi dan kemiskinan desa analisa struktur ekonomi politik pedesaan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505093&val=10355&title=globalisasi%20dan%20kemiskinan%20desa%20analisa%20struktur%20ekonomi%20politik%20pedesaan)

Kumar, B., & Pinky, S. D. (2021). Addressing economic and health challenges

of COVID-19 in Bangladesh: Preparation and response. *Journal of public affairs*.
<https://doi.org/10.1002/pa.2556>

Kwon, H., & Kim, E. (2014). Poverty reduction and good governance: Examining the rationale of the Millennium Development Goals. *Development and Change*. <https://doi.org/10.1111/dech.12084>

Li, S. (2014). Poverty Reduction and Effects of Pro-poor Policies in Rural China. *China & World Economy*. <https://doi.org/10.1111/j.1749-124X.2014.12060.x>

Liu, Y., & Xu, Y. (2016). A geographic identification of multidimensional poverty in rural China under the framework of sustainable livelihoods analysis. In *Applied Geography*. Elsevier.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622816301400>

Mesquita, E. B. De. (2005). The quality of terror. *American journal of political science*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2005.00139.x>

Montalvo, J. G., & Ravallion, M. (2010). The pattern of growth and poverty reduction in China. *Journal of Comparative Economics*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596709000833>

Mora-Rivera, J., & García-Mora, F. (2021). Internet access and poverty reduction: Evidence from rural and urban Mexico. In *Telecommunications Policy*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030859612030166X>

Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV.

Notten, G. (2016). How poverty indicators confound poverty reduction evaluations: The targeting performance of income transfers in Europe. In *Social Indicators Research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0996-4>

Nurhasim, M., Rahman, A. R., Cahyono, H., & Wiratama, R. T. (2014). Model Kebijakan yang Memihak Kelompok Orang Miskin Berbasis Good Governance.

Oktavianti, H. (2008). Menelaah Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(2 Oktober).

Oman, S. (2005). *Sosiologi dan Politik ekonomi*. UMM Press.

Rachbini, D. J. (1994). *Perspektif Public Choice*. Prisma.

Stewart, F. (2013). *The Politics of Poverty Reduction* by Paul Mosley with Blessing Chiripanhura, Jean Grugel, and Ben Thirkell-White, Oxford: Oxford University Press, 2012 Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1111/deve.12028>

Sumardi Mulyanto dan Evers, H.-D. (Ed.). (1999). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*.

Sumner, A., & Tiwari, M. (2011). Global poverty reduction to 2015 and beyond. *Global Policy*. <https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2011.00077.x>

Sunyoto, U. (2006). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Tamlin, H., Cresswell, J., & Hoppe, A. (2021). Experiencing visions of Canadian church workers: Exploring the mentality fueling systems involved in poverty reduction. *Journal of Community* <https://doi.org/10.1002/jcop.22555>

Valensisi, G. (2020). COVID-19 and global poverty: Are LDCs being left behind? In *The European Journal of Development Research*. Springer. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00314-8>

Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2000). Criteria for infrastructure investment: normative, positive, and prudential perspectives. In *POLICY* RENOUF PUBLISHING COMPANY

Wachira, C., & Ruger, J. P. (2011). National poverty reduction strategies and HIV/AIDS governance in Malawi: A preliminary study of shared health governance. *Social science & medicine*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953610004338>

Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Pelajar.

Zou, Q., He, X., Li, Z., Xu, W., & ... (2019). The effects of poverty reduction policy on health services utilization among the rural poor: a quasi-experimental study in central and western rural China. In ... for Equity in [equityhealthj.biomedcentral.com. https://doi.org/10.1186/s12939-019-1099-7](https://doi.org/10.1186/s12939-019-1099-7)